

MODUL PEMBELAJARAN

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Memahami wilayah, kedaulatan, persatuan, ancaman, dan peran warga negara

Materi Utama

- 1 Konsep NKRI
- 2 Wilayah dan kedaulatan negara
- 3 Persatuan dan kesatuan
- 4 Ancaman terhadap keutuhan NKRI
- 5 Peran masyarakat mempertahankan persatuan

IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Topik	Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Sasaran	Pelajar, mahasiswa, aparatur, organisasi masyarakat, dan peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Alokasi waktu	5–6 sesi pembelajaran; dapat disesuaikan dengan kebutuhan fasilitator
Pendekatan	Kontekstual, diskusi kasus, refleksi, kolaborasi, dan rencana aksi
Produk belajar	Pemahaman konsep NKRI serta komitmen konkret menjaga persatuan dan keutuhan negara

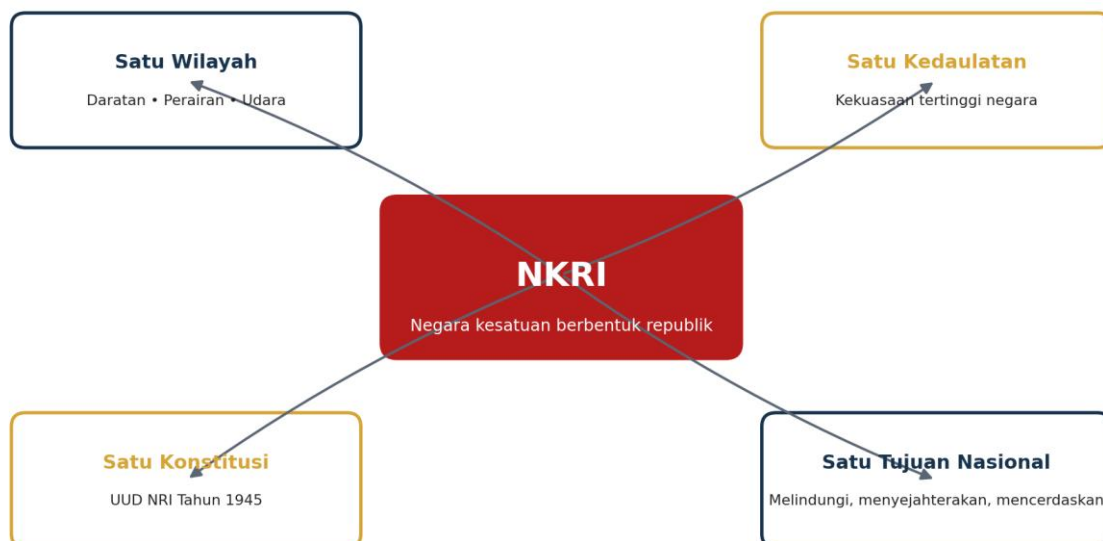
Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep dan karakter dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menguraikan wilayah negara, kedaulatan, dan perbedaan antara kedaulatan dengan hak berdaulat.
3. Menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang majemuk.
4. Mengidentifikasi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
5. Merancang tindakan nyata masyarakat untuk mempertahankan persatuan sesuai nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.

LANDASAN KONSTITUSIONAL

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 25A menegaskan NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas, dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Peta Konsep



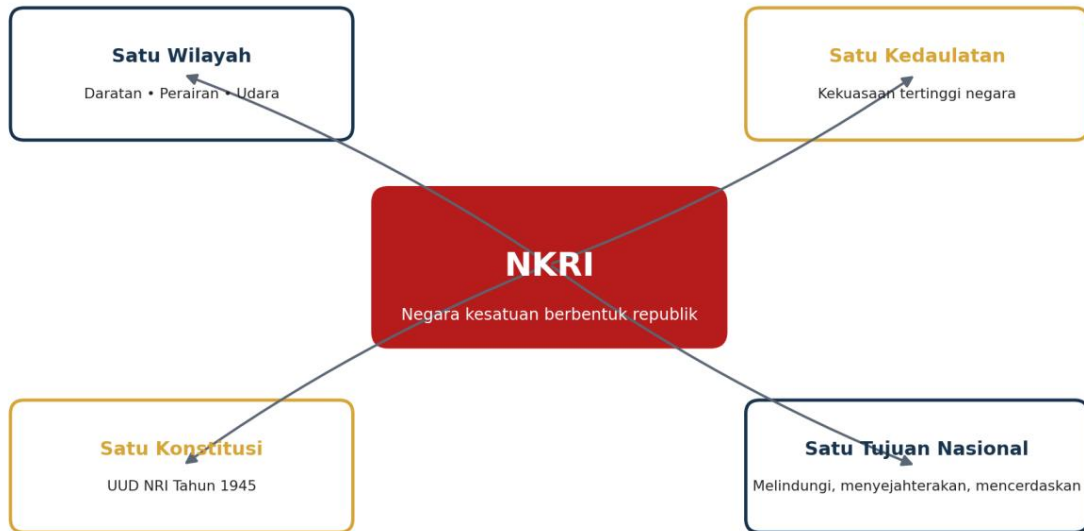
PERTANYAAN PEMANTIK

Apa yang membuat ribuan pulau, beragam suku, bahasa, agama, dan budaya tetap dapat berdiri sebagai satu negara? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi benang merah seluruh modul.

MATERI 1

Konsep NKRI

NKRI bukan hanya bentuk negara, tetapi kerangka konstitusional yang menyatukan wilayah, rakyat, pemerintahan, dan tujuan nasional.



1.1 Pengertian NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat satu dan tidak terbagi menjadi negara-negara bagian yang berdaulat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Aspek	Makna dalam NKRI	Implikasi
Bentuk negara	Negara kesatuan	Kedaulatan negara tetap satu; daerah bukan negara bagian.
Bentuk pemerintahan	Republik	Kepala negara tidak berdasarkan keturunan; pemerintahan berjalan menurut konstitusi.
Kedaulatan	Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD	Kekuasaan dibatasi konstitusi dan hukum.
Pemerintahan daerah	Otonomi dalam negara kesatuan	Daerah mengatur urusan tertentu tanpa memisahkan diri dari NKRI.
Identitas kebangsaan	Bhinneka Tunggal Ika	Keberagaman diikat oleh identitas dan tujuan kebangsaan yang sama.

1.2 Ciri Utama Negara Kesatuan

- Terdapat satu konstitusi negara: UUD NRI Tahun 1945.
- Terdapat satu pemerintahan pusat yang memegang kewenangan nasional menurut konstitusi dan undang-undang.
- Daerah memiliki otonomi, tetapi bukan kedaulatan tersendiri.
- Kebijakan nasional menjaga kesatuan hukum, pertahanan, politik luar negeri, dan kepentingan strategis lainnya.
- Persatuan wilayah dan rakyat menjadi kepentingan bersama seluruh warga negara.

KUNCI KONSEP

Desentralisasi tidak mengubah Indonesia menjadi negara federal. Otonomi daerah adalah cara mengelola keragaman kebutuhan daerah di dalam satu negara kesatuan.

NKRI, Otonomi, dan Kebhinnekaan

Konsep	Bukan berarti	Makna yang tepat
Persatuan	Semua daerah harus sama	Perbedaan dikelola untuk kepentingan bersama.
Otonomi daerah	Daerah berdaulat sendiri	Daerah mengurus kewenangan yang diberikan/diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Kebhinnekaan	Membiarkan kelompok berjalan sendiri-sendiri	Menghormati perbedaan sambil menjaga identitas nasional.
Kesatuan hukum	Menghapus kekhasan lokal	Menjamin kepastian dan kesetaraan dalam kerangka hukum nasional.
Nasionalisme	Menolak budaya lokal	Mencintai Indonesia sekaligus merawat kekayaan budaya daerah.

Latihan Cepat

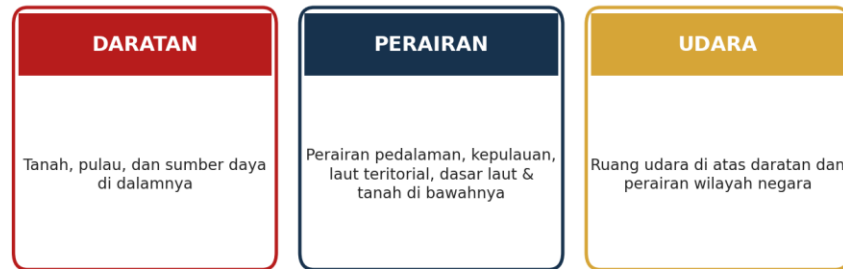
Pernyataan	Benar / Salah	Alasan
Provinsi merupakan negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri.		
Otonomi daerah dapat berjalan tanpa mengurangi prinsip negara kesatuan.		
Persatuan menuntut seluruh budaya daerah menjadi seragam.		
Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945.		

MATERI 2

Wilayah dan Kedaulatan Negara

Wilayah adalah ruang berlakunya kedaulatan negara, sedangkan pengelolaannya harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Ruang Wilayah NKRI



Kedaulatan berlaku di wilayah negara; di luar wilayah tertentu Indonesia dapat memiliki hak berdaulat sesuai hukum nasional dan internasional.

Landasan: Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

2.1 Unsur Wilayah Negara

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengatur wilayah Indonesia yang meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Ruang wilayah	Contoh unsur	Mengapa penting
Daratan	Pulau, tanah, kawasan perbatasan	Ruang hidup, pemerintahan, permukiman, pertanian, pertambangan, dan infrastruktur.
Perairan	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial	Jalur penghubung antarpulau, sumber daya, perdagangan, keamanan, dan ekosistem.
Udara	Ruang udara di atas darat dan perairan wilayah	Keselamatan penerbangan, pertahanan, komunikasi, dan pengawasan wilayah.
Kawasan perbatasan	Wilayah yang berhadapan dengan negara lain	Beranda depan NKRI; penting untuk keamanan, pelayanan publik, dan hubungan antarnegara.

2.2 Kedaulatan dan Hak Berdaulat

Istilah	Makna ringkas	Contoh pemahaman
Kedaulatan	Kekuasaan tertinggi negara dalam wilayahnya sesuai konstitusi dan hukum internasional.	Negara berwenang menegakkan hukum di wilayahnya.
Hak berdaulat	Hak tertentu untuk mengeksplorasi, memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan sumber daya di zona tertentu menurut hukum internasional.	Di wilayah yurisdiksi tertentu, hak Indonesia tidak identik dengan kedaulatan penuh atas semua aktivitas.

Istilah	Makna ringkas	Contoh pemahaman
---------	---------------	------------------

CATATAN PENTING

Kedaulatan dan hak berdaulat bukan istilah yang sama. Pemahaman yang tepat membantu warga menilai isu batas, sumber daya, pelayaran, dan hubungan internasional secara lebih akurat.

2.3 Batas dan Pengelolaan Wilayah

Dimensi	Pokok pengaturan	Peran warga/masyarakat
Batas wilayah	Ditetapkan berdasarkan hukum nasional, perjanjian, dan hukum internasional sesuai konteksnya.	Tidak menyebarkan informasi batas yang tidak terverifikasi; merujuk sumber resmi.
Pengelolaan sumber daya	Dilakukan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan keberlanjutan.	Mengawasi, menjaga lingkungan, dan menolak praktik ilegal.
Kawasan perbatasan	Memerlukan layanan publik, konektivitas, ekonomi, dan keamanan.	Memperkuat kegiatan ekonomi legal, pendidikan, dan identitas kebangsaan.
Pulau dan unsur geografis	Pendataan dan penamaan merupakan bagian dari pengelolaan wilayah.	Merawat pengetahuan lokal sekaligus mendukung pendataan resmi.

Aktivitas: Analisis Isu Wilayah

Situasi	Pertanyaan Analisis
Beredar unggahan viral yang menyatakan sebuah pulau “diambil negara lain”.	Sumber resmi apa yang harus diperiksa? Apakah unggahan membedakan antara wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi?
Terjadi pencurian sumber daya alam di wilayah laut.	Apa dampaknya bagi kedaulatan, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat pesisir?
Masyarakat perbatasan lebih mudah mengakses layanan dari negara tetangga.	Apa solusi yang memperkuat kehadiran negara tanpa mengabaikan kebutuhan warga?

MATERI 3

Persatuan dan Kesatuan

Keberagaman adalah fakta sosial; persatuan adalah pilihan kebangsaan yang harus terus dirawat melalui keadilan, dialog, dan kerja sama.



Persatuan bukan menyeragamkan perbedaan, tetapi mengikat keberagaman dalam tujuan dan identitas kebangsaan yang sama.

3.1 Makna Persatuan dan Kesatuan

Persatuan menunjukkan proses menyatukan berbagai unsur yang berbeda dalam tujuan bersama. **Kesatuan** menunjukkan keadaan utuh yang terbentuk karena unsur-unsur tersebut terikat oleh identitas, aturan, dan kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Nilai pengikat	Bentuk perilaku	Dampak bagi NKRI
Pancasila	Menghormati martabat manusia, musyawarah, keadilan, toleransi.	Menjadi orientasi nilai bersama.
Bhinneka Tunggal Ika	Menghormati perbedaan tanpa diskriminasi.	Keberagaman tidak berubah menjadi perpecahan.
Gotong royong	Bekerja lintas kelompok untuk kepentingan bersama.	Meningkatkan solidaritas dan kepercayaan sosial.
Keadilan	Memperjuangkan akses dan perlakuan yang adil.	Mengurangi kecemburuan sosial dan konflik.
Taat hukum	Menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah.	Mencegah kekerasan dan tindakan main hakim sendiri.

3.2 Faktor Penguat Persatuan

- Kesadaran sejarah dan cita-cita kebangsaan yang sama.
- Keadilan sosial dan pemerataan kesempatan.
- Komunikasi publik yang jujur dan bertanggung jawab.
- Ruang dialog lintas suku, agama, budaya, generasi, dan kelompok sosial.
- Keteladanan pemimpin dan tokoh masyarakat.
- Literasi digital dan kemampuan memilah informasi.

3.3 Persatuan di Era Digital

Situasi digital	Risiko terhadap persatuan	Sikap yang tepat
Hoaks identitas/SARA	Memicu prasangka dan permusuhan.	Periksa fakta, jangan sebarkan, laporkan melalui kanal yang tepat.
Potongan video tanpa konteks	Membentuk persepsi keliru.	Cari sumber lengkap dan bandingkan informasi.
Perdebatan politik	Polarisasi dan penghinaan.	Kritik gagasan, bukan identitas atau martabat orang.
Algoritma ruang gema	Hanya melihat pandangan sejenis.	Sengaja membaca sumber beragam dan kredibel.
Provokasi anonim	Memancing reaksi emosional.	Tahan respons, verifikasi, dokumentasikan bila perlu.

PRINSIP PRAKTIS

Sebelum membagikan informasi yang berpotensi memecah belah, gunakan tiga pertanyaan: Benarkah? Bermanfaatkah? Apakah cara penyampaian menghormati orang lain dan hukum?

Latihan Reflektif

Pertanyaan	Jawaban Peserta
Apa bentuk keberagaman paling nyata di lingkungan Anda?	
Apa potensi gesekan yang perlu dicegah?	
Kegiatan bersama apa yang dapat memperkuat rasa saling percaya?	

MATERI 4

Ancaman terhadap Keutuhan NKRI

Ancaman dapat muncul dalam bentuk militer, nonmiliter, maupun hibrida. Respons yang efektif memerlukan ketahanan masyarakat dan koordinasi dengan negara.

Spektrum Ancaman terhadap Kedaulatan, Keutuhan Wilayah, dan Keselamatan Bangsa



Respons warga: waspada, taat hukum, menjaga persatuan, meningkatkan literasi digital, melapor melalui kanal resmi, serta ikut bela negara sesuai kapasitas.

4.1 Spektrum Ancaman

UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara mengelompokkan ancaman menjadi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Wujud ancaman dapat sangat beragam dan berkembang mengikuti perubahan teknologi, lingkungan, ekonomi, dan geopolitik.

Kategori	Contoh	Dampak potensial	Respons masyarakat
Militer	Agresi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah.	Kedaulatan dan keutuhan wilayah terganggu.	Taat instruksi resmi, tidak menghambat aparat, menjaga informasi sensitif.
Nonmiliter	Bencana, narkoba, wabah, kerusakan lingkungan, sabotase ekonomi, disinformasi.	Keselamatan, ketahanan sosial, ekonomi, dan layanan publik terganggu.	Kesiapsiagaan, literasi, gotong royong, pelaporan, kepatuhan hukum.
Hibrida	Gabungan tekanan militer/nonmiliter, siber, informasi, ekonomi, proksi.	Membingungkan batas antara damai dan konflik; memecah kepercayaan publik.	Verifikasi informasi, penguatan komunitas, keamanan digital, koordinasi resmi.

4.2 Ancaman Sosial dan Informasi

Ancaman	Tanda-tanda	Mitigasi
Intoleransi dan kebencian	Pelabelan, dehumanisasi, penolakan hak kelompok lain.	Dialog, pendidikan kebhinekaan, penegakan hukum.
Separatisme/ajakan kekerasan	Propaganda pemisahan disertai pembenaran kekerasan.	Pendekatan hukum, kesejahteraan, komunikasi publik, penguatan kepercayaan.
Hoaks dan disinformasi	Konten emosional, sumber tidak jelas, manipulasi visual/konteks.	Cek sumber, bandingkan, gunakan kanal pemeriksa fakta/instansi resmi.

Ancaman	Tanda-tanda	Mitigasi
Konflik komunal	Rumor, mobilisasi massa, pembalasan antar kelompok.	Mediasi dini, tokoh lintas kelompok, aparat, perlindungan warga.
Serangan siber	Akun diretas, layanan terganggu, pencurian data.	Kata sandi kuat, autentikasi berlapis, pembaruan sistem, pelaporan insiden.

4.3 Prinsip Respons Warga

1. Kenali risiko tanpa membesar-besarkan kepanikan.
2. Verifikasi informasi melalui sumber resmi dan kredibel.
3. Hindari tindakan main hakim sendiri atau penyebaran identitas yang membahayakan orang lain.
4. Gunakan jalur pelaporan yang sah sesuai jenis ancaman.
5. Utamakan keselamatan, persatuan, dan kepatuhan hukum.
6. Bangun ketahanan komunitas melalui pendidikan, gotong royong, dan kesiapsiagaan.

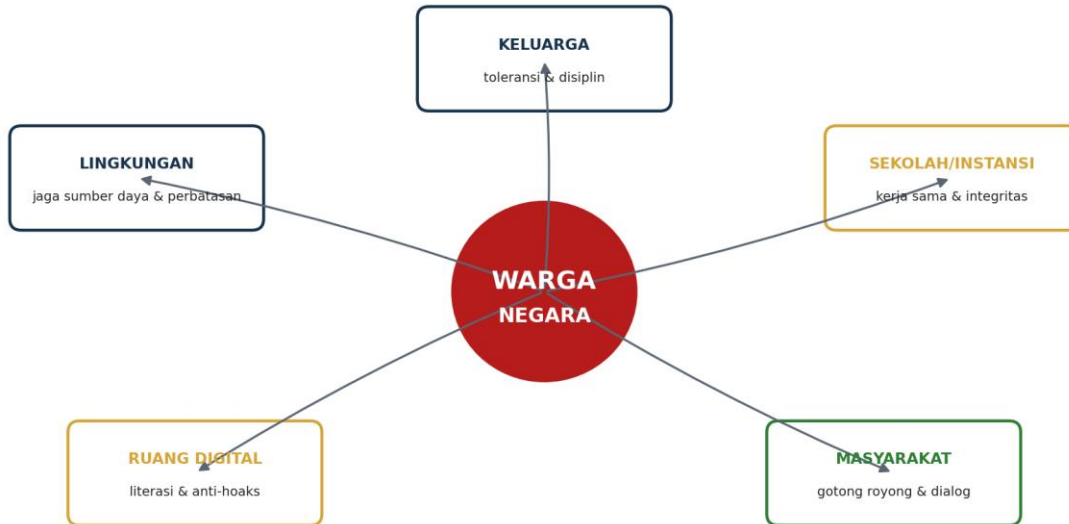
STUDI KASUS SINGKAT

Sebuah pesan berantai menyebut akan terjadi kerusuhan antarkelompok dan meminta warga membawa senjata untuk berjaga. Tindakan tepat bukan meneruskan pesan atau melakukan mobilisasi sendiri, melainkan memverifikasi informasi, menghindari provokasi, menjaga keselamatan, dan berkoordinasi dengan aparat/otoritas setempat.

MATERI 5

Peran Masyarakat dalam Mempertahankan Persatuan

Pertahanan persatuan tidak hanya dilakukan ketika terjadi konflik; ia dibangun setiap hari melalui perilaku, relasi sosial, literasi, dan kepatuhan hukum.



5.1 Bela Negara dalam Kehidupan Sehari-hari

Keikutsertaan warga dalam bela negara dapat diwujudkan sesuai peran dan kapasitas masing-masing. Tidak semua bentuk bela negara bersifat militer. Menjaga persatuan, menaati hukum, meningkatkan kompetensi, merawat lingkungan, membantu sesama, dan melawan disinformasi juga memperkuat ketahanan nasional.

Ruang kehidupan	Tindakan konkret	Nilai yang diperkuat
Keluarga	Membiasakan dialog, menghormati perbedaan, disiplin, dan tanggung jawab.	Toleransi, integritas, kasih sayang.
Sekolah/kampus/instansi	Kolaborasi lintas latar belakang, anti-perundungan, pelayanan yang adil.	Profesionalitas, persamaan, gotong royong.
Masyarakat	Kerja bakti, mediasi konflik, musyawarah, membantu saat bencana.	Solidaritas dan kepercayaan sosial.
Ruang digital	Tidak menyebar hoaks, menjaga data, berkomunikasi santun.	Literasi, keamanan, tanggung jawab.
Lingkungan/perbatasan	Menjaga sumber daya, mendukung aktivitas ekonomi legal, melapor pelanggaran.	Kedaulatan, keberlanjutan, kepatuhan hukum.

5.2 Matriks Peran Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan	Peran utama	Contoh kegiatan
Pemerintah	Pelayanan, regulasi, pembangunan, perlindungan warga.	Layanan perbatasan, pendidikan kebangsaan, mitigasi konflik.
TNI/Polri dan aparat terkait	Pertahanan, keamanan, penegakan hukum sesuai kewenangan.	Pengamanan wilayah, penanganan ancaman, edukasi keamanan.

Pemangku kepentingan	Peran utama	Contoh kegiatan
Tokoh agama/adat/masyarakat	Membangun kepercayaan dan mediasi sosial.	Dialog lintas kelompok, pesan damai, penyelesaian sengketa.
Sekolah/ perguruan tinggi	Membentuk pengetahuan, karakter, dan nalar kritis.	Proyek kebhinekaan, literasi digital, pengabdian masyarakat.
Media/komunitas digital	Informasi yang akurat dan bertanggung jawab.	Klarifikasi hoaks, edukasi publik, moderasi ruang diskusi.
Warga negara	Menjaga ketertiban, persatuan, dan kepentingan bersama.	Gotong royong, taat hukum, partisipasi, pelaporan.

5.3 Rencana Aksi 30 Hari

Minggu	Aksi	Indikator keberhasilan
1	Pemetaan potensi keberagaman dan potensi gesekan di lingkungan.	Tersusun daftar isu dan pihak yang perlu diajak berdialog.
2	Kegiatan kolaboratif lintas kelompok/komunitas.	Ada partisipasi dan hasil kegiatan bersama.
3	Kampanye kecil literasi digital/anti-hoaks.	Ada materi edukasi dan jangkauan peserta.
4	Refleksi dan tindak lanjut.	Ada catatan pembelajaran dan komitmen lanjutan.

STUDI KASUS TERPADU

SKENARIO

Di sebuah daerah perbatasan, beredar konten media sosial yang menyebut pemerintah pusat “mengabaikan” wilayah tersebut. Konten itu mencampur data benar tentang keterbatasan layanan dengan klaim palsu bahwa sebagian wilayah telah berpindah ke negara lain. Perdebatan meningkat menjadi saling menghina antarkelompok dan muncul ajakan untuk melakukan aksi kekerasan.

Tugas Kelompok

Langkah	Pertanyaan
1. Identifikasi fakta	Informasi apa yang harus diverifikasi melalui sumber resmi?
2. Analisis NKRI	Bagaimana konsep negara kesatuan, wilayah, dan kedaulatan membantu memahami kasus?
3. Analisis persatuan	Faktor apa yang membuat isu pelayanan berubah menjadi konflik identitas?
4. Analisis ancaman	Apakah terdapat unsur ancaman nonmiliter/hibrida? Jelaskan.
5. Rencana respons	Apa tindakan pemerintah, tokoh masyarakat, media, dan warga dalam 24 jam pertama?
6. Pencegahan	Apa program jangka menengah agar kejadian serupa tidak berulang?

KUNCI ANALISIS

Pisahkan fakta, opini, dan provokasi. Masalah layanan publik perlu diselesaikan dengan perbaikan kebijakan; disinformasi perlu diklarifikasi; ajakan kekerasan perlu ditangani melalui jalur hukum dan pengamanan; relasi sosial perlu dipulihkan melalui dialog dan tindakan nyata.

RANGKUMAN MODUL

Materi	Inti Pembelajaran
1. Konsep NKRI	Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Otonomi daerah berlangsung dalam kerangka satu kedaulatan dan satu konstitusi.
2. Wilayah dan kedaulatan	Wilayah NKRI mencakup darat, perairan, dan udara. Kedaulatan berbeda dengan hak berdaulat.
3. Persatuan dan kesatuan	Keberagaman dipersatukan oleh nilai, tujuan, hukum, identitas kebangsaan, keadilan, dan kerja sama.
4. Ancaman terhadap NKRI	Ancaman dapat berupa militer, nonmiliter, dan hibrida; respons harus sah, proporsional, dan terkoordinasi.
5. Peran masyarakat	Menjaga NKRI dilakukan setiap hari melalui toleransi, gotong royong, taat hukum, literasi digital, kesiapsiagaan, dan partisipasi.

Checklist Kompetensi

Saya mampu...	Ya	Perlu belajar lagi
Menjelaskan makna negara kesatuan dan republik.	☐	☐
Membedakan kedaulatan dengan hak berdaulat.	☐	☐
Mengidentifikasi faktor penguat persatuan.	☐	☐
Membedakan ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida.	☐	☐
Merancang aksi konkret menjaga persatuan.	☐	☐

EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Pilihan Ganda

1. Bentuk negara Indonesia menurut Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah ...

- A. Federal B. Kesatuan C. Konfederasi D. Monarki

2. Pernyataan yang tepat tentang otonomi daerah adalah ...

- A. Daerah memiliki kedaulatan sendiri B. Daerah boleh memisahkan diri C. Daerah mengatur urusan tertentu dalam kerangka NKRI D. Daerah tidak memiliki kewenangan apa pun

3. Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai ...

- A. Negara benua B. Negara kepulauan berciri Nusantara C. Negara kota D. Negara federal

4. Yang merupakan unsur wilayah negara menurut UU 43/2008 adalah ...

- A. Daratan, perairan, dan ruang udara B. Hanya daratan C. Hanya laut D. Hanya wilayah berpenduduk

5. Hak berdaulat berbeda dari kedaulatan karena ...

- A. Tidak diatur hukum B. Berlaku tanpa batas C. Merupakan hak tertentu pada zona tertentu D. Sama dengan kepemilikan wilayah penuh

6. Persatuan dalam kebhinekaan berarti ...

- A. Menyeragamkan budaya B. Menghapus identitas daerah C. Mengikat perbedaan dalam tujuan bersama D. Menghindari interaksi antarkelompok

7. Contoh ancaman nonmiliter adalah ...

- A. Agresi bersenjata B. Serangan narkoba dan disinformasi C. Parade budaya D. Musyawarah warga

8. Ancaman hibrida adalah ...

- A. Ancaman yang hanya terjadi di laut B. Gabungan berbagai metode ancaman C. Ancaman yang tidak berdampak D. Persaingan olahraga

9. Sikap tepat terhadap hoaks yang berpotensi memecah belah adalah ...

- A. Segera meneruskan B. Menambah komentar provokatif C. Memverifikasi dan tidak menyebarkan D. Membuat versi baru

10. Bela negara dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan ...

- A. Taat hukum dan menjaga persatuan B. Main hakim sendiri C. Menyebar data rahasia D. Mengabaikan bencana

B. Uraian

1. Jelaskan hubungan antara NKRI, otonomi daerah, dan kedaulatan negara.
2. Jelaskan perbedaan kedaulatan dan hak berdaulat menggunakan contoh sederhana.
3. Mengapa keadilan sosial penting bagi persatuan dan kesatuan?
4. Pilih satu ancaman nonmiliter yang relevan di lingkungan Anda dan susun langkah mitigasinya.
5. Susun tiga tindakan konkret yang dapat Anda lakukan selama 30 hari untuk memperkuat persatuan.

C. Rubrik Penilaian Uraian

Kriteria	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan konsep	Sangat tepat dan lengkap	Tepat, ada kekurangan kecil	Sebagian tepat	Banyak kekeliruan
Argumentasi	Logis, berbasis contoh/aturan	Logis dan cukup jelas	Masih umum	Tidak terstruktur
Solusi/aksi	Konkret, realistis, relevan	Cukup konkret	Masih abstrak	Tidak sesuai masalah

Kunci Pilihan Ganda

1. B 2. C 3. B 4. A 5. C 6. C 7. B 8. B 9. C 10. A

PENILAIAN DIRI

Nilai akhir bukan hanya berasal dari tes, tetapi juga dari kemampuan menghubungkan konsep dengan tindakan nyata yang menjaga persatuan, ketertiban, dan kepentingan bersama.

PANDUAN SINGKAT FASILITATOR

Tahap	Durasi	Metode	Fokus
Pembukaan	15 menit	Pemantik & polling	Apa arti NKRI bagi peserta?
Materi 1	45 menit	Paparan + diskusi	Konsep negara kesatuan dan otonomi.
Materi 2	50 menit	Chart + studi isu	Wilayah, kedaulatan, hak berdaulat.
Materi 3	45 menit	Diskusi kelompok	Persatuan dalam keberagaman.
Materi 4	50 menit	Analisis kasus	Ancaman militer/nonmiliter/hibrida.
Materi 5	40 menit	Workshop	Rencana aksi masyarakat.
Evaluasi	30 menit	Tes & refleksi	Pemahaman dan komitmen tindak lanjut.

Tips Fasilitasi

- Gunakan contoh lokal agar peserta mudah menghubungkan konsep dengan pengalaman.
- Bedakan fakta hukum dengan pendapat politik atau narasi media sosial.
- Ketika membahas konflik, hindari pelabelan kelompok dan fokus pada perilaku/masalah yang dapat diverifikasi.
- Dorong peserta merumuskan solusi yang legal, damai, inklusif, dan dapat dilakukan.
- Gunakan rencana aksi 30 hari sebagai tindak lanjut setelah sesi selesai.

SUMBER DAN REFERENSI UTAMA

Sumber	Akses
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	JDIH DPR RI – https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	Database Peraturan BPK – https://peraturan.bpk.go.id/Details/39738/uu-no-43-tahun-2008
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	Database Peraturan BPK – https://peraturan.bpk.go.id
Materi ketatanegaraan dan sistem pemerintahan negara	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI – https://pusdik.mkri.id

CATATAN PENGGUNAAN

Modul ini bersifat edukatif. Untuk kebutuhan keputusan hukum, administrasi pemerintahan, atau penanganan kasus tertentu, selalu periksa naskah peraturan terbaru dan sumber resmi yang berlaku.

Glosarium

Istilah	Makna ringkas
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedaulatan	Kekuasaan tertinggi negara sesuai konstitusi dan hukum.
Hak berdaulat	Hak tertentu negara pada zona tertentu berdasarkan hukum nasional/internasional.
Otonomi daerah	Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu sesuai peraturan.
Ancaman hibrida	Ancaman yang menggabungkan beragam metode/ranah secara bersamaan atau terkoordinasi.
Bela negara	Sikap dan perilaku warga yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.